

Judul : Konsisi riset terkesan kacau
Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Senayan Terima Keluhan ASN BRIN

Kondisi Riset Terkesan Kacau

Komisi VII DPR menerima pengaduan para periset pasca-terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses integrasi para peneliti dinilai tak berjalan mulus, masih banyak kendala.

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman bisa memahami kegelisahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang masa depan mereka di BRIN. ASN peneliti ini diminta blak-blakan menjelaskan persoalan di BRIN saat ini, walaupun berkonsekuensi besar terhadap karier mereka.

"Saya bisa merasakan suasana kebatinan itu. Karenanya, jangan tanggung-tanggung, buka semua. Kita sepakat bahwa spiritnya membuat riset kita menjadi lebih baik," tegas Maman dalam rapat Komisi VII bersama Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional (MPI) di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Maman menegaskan, Komisi VII sepakat menjaga marwah BRIN sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, itu tidak akan menghilangkan semangat mengkritisi kebijakan BRIN yang dianggap salah.

"Saya apresiasi bapak-bapak datang ke sini dengan segala risiko. Bapak kami undang tuntas. Jadi tidak usah nangung-

nangung gitu loh," jelasnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, Komisi VII menginginkan riset-riset yang dihasilkan para peneliti pasca-peleburan ke BRIN bisa jauh lebih bagus.

DPR tidak menghendaki situasi di BRIN kemudian malah sebaliknya, bahkan jauh dari semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional (Sisnas) Iptek.

"Kasih bu Andi (Andi Yuliani Paris), Bu Mercy (Mercy Chriesty Barends), bikin Undang-Undang Sisnas Iptek sampai begadang tapi hasilnya begini loh," katanya.

Maman menegaskan, negara telah investasi sangat besar ke para periset di BRIN. Jika para ASN BRIN menyampaikan keluhan ke DPR karena tidak difungsikan sebagaimana layaknya, berarti investasi negara bisa saja disia-siakan.

"Bisa disebut kerugian negara itu, makanya saya mau undang juga KPK. Bisa nggak penyalahgunaan para periset ini bisa masuk pada kategori korupsi," ujarnya.

Anggota Komisi VII Mulyanto menambahkan, persoalan di BRIN sebenarnya ada dua, sebagaimana disampaikan MPI, yakni kelembagaan dan pimpinan yang otoriter. Dua ini bersinergi kemudian menyebabkan kekisruhan di BRIN.

"Kelembagaan intinya satu, teman-teman (MPI) tidak ingin dilebur, terintegrasi saja. Karena banyak lembaga (yang dilebur ke BRIN) yang dibentuk berdasar undang-undang," katanya.

Dia mencontohkan Badan Tenaga Atom nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) yang harusnya terpisah dari BRIN tapi tetap dipaksakan untuk dilebur. Walhasil, fungsi kedua lembaga ini menjadi tidak nampak.

"Ketika dilebur ke BRIN ya jadi kecil, jadi lembaga kacau," katanya.

Kondisi ini, lanjut dia, diperparah dengan kepemimpinan BRIN yang tidak kapabel bahkan cenderung otoriter. Walhasil, BRIN kesulitan menjalankan UU Sisnas Iptek dan memaksimalkan fungsi lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Pemimpin yang ada mengabaikan hanya riset dasar, (akibatnya) hilang semua (Litbangjirap).

BPPT hilang, perekayasa hilang. Itu persoalan besarnya dari sisi kelembagaan. Akibat dari peleburan itu ya sumber daya manusia, hingga anggaran (BRIN) macet," katanya.

Sementara, perwakilan MPI Maxensius menuturkan, hasil kajian dari MPI, terdapat lima rapor merah BRIN.

Pertama, transisi manajemen dan birokrasi yang tidak berjalan baik. Ini yang menyebabkan sumber daya pelaku Litbangjirap tidak termanfaatkan optimal.

"Banyak yang menunggu penempatan. Dan ini suatu kerugian besar buat bangsa. Kita temukan manajemen transisi dan birokrasi yang sangat jauh dari *good governance* dan sangat berbahaya dalam upaya mendorong nasionalisme di antara periset," katanya.

Kedua, terjadi sentralisasi dan birokrasi yang semakin rumit di BRIN. Kondisi kerapatan antarperiset, bahan, peralatan, anggaran dan operator yang harusnya bergerak dalam satu komando, justru kondisinya terdisrupsi dan terintegrasi. Hal ini menjadi problem bagi BRIN dalam mengejar kinerja yang cepat, efektif dan responsif dan berbasis pada bukti yang baik.

"Sampai saat ini (BRIN) masih dalam proses *forming*

dan *storming*, entah sampai kapan kita keluar dari ini, kapan kita *norming* dan *performing*. Padahal banyak masalah bangsa yang harus kita selesaikan segera," ujarnya.

Ketiga, BRIN berjalan dengan skema program tanpa visi, misi dan arah yang jelas. Ini disebabkan pimpinan BRIN lebih fokus kepada basis riset, bukan kepada agenda riil inovasi.

Ironisnya, pimpinan BRIN lebih mendorong para periset, peneliti dan perekayasa BRIN untuk membuat paper sebagai indikator kinerja. Ini pula yang terjadi kepada para peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Peneliti mendapat royalti kalau BPPT berhasil menjual *prototype*-nya ke industri. Saya cek lembaga riset di luar negeri, terutama China dan Rusia, kok kita semrawut tidak jelas," ujarnya.

Keempat, penghentian, pengantungan program strategis nasional yang diampu ex lembaga pemerintahnya non kementerian. Ini menyebabkan hasil penelitian seperti *early warning* dalam musibah tsunami menjadi tidak jelas.

Terakhir, pelemahan visi dan penyelenggaraan pemajuan iptek. "Ini betul-betul kontradiktif," tambah dia. ■ KAL